

PARTISIPASI TOKOH ADAT SEBAGAI STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILU DI KOTA PALANGKA RAYA

The Involvement of Traditional Leaders as a Supervision Strategy of the Palangka Raya City Election Supervisory Agency in the Regional Head Elections and General Elections in Palangka Raya City

Edi Winarno*

Danes Jaya Nagara

Luluk Tri Harinie

Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

*email:

ediwinarnoparay@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya Tokoh Adat, dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan persiapan pemilihan umum tahun 2024, serta upaya perbaikan strategi pengawasan Bawaslu Kota Palangka Raya dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data yang sistematis, faktual, dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Palangka Raya memiliki empat strategi utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, yaitu kerjasama dengan perguruan tinggi dan ormas, sosialisasi melalui spanduk dan brosur, dan penggunaan media sosial. Meskipun strategi tersebut mendapat respon positif dari para tokoh adat, perlu dilakukan peningkatan dengan melibatkan lebih banyak tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan pengawasan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya.

Abstract

This research aims to understand the strategies employed by the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Palangka Raya City in increasing community participation, particularly among indigenous leaders, in the 2020 regional head elections and preparation for the 2024 general elections, as well as efforts to improve Bawaslu's supervision strategies for the 2024 elections. A descriptive research method with a qualitative approach was used to generate systematic, factual, and accurate data. The results show that Bawaslu of Palangka Raya City has four main strategies to increase community participation in regional head and general elections, namely collaboration with universities and organizations, socialization through banners and brochures, and the use of social media. Although these strategies received positive responses from indigenous leaders, involving more indigenous, religious, and community leaders in every supervision activity by Bawaslu of Palangka Raya City is necessary.

Kata Kunci:

Strategi
Pemilihan Umum
Tokoh Adat

Keywords:

Strategy
General Elections
Indigenous Leader

Accepted

January 2023

Published

April 2023



© year The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/restorica.v9i1>

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Demokrasi. Konsep negara demokrasi adalah dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Ini merupakan wujud dari implementasi kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat secara bebas mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat. Salah satu wujud sistem

Demokrasi adalah adanya pemilihan pemimpin melalui pemilihan umum (David et al., n.d.).

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan, berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pada saat ini, yaitu di zaman reformasi, tuntutan untuk Pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan

semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja, maka diusulkan agar menjadi permanen (Solihah et al., 2018).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya mencatat bahwa pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Palangka Raya diwarnai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Namun terhadap penanganan pelanggaran yang ditangani oleh jajaran Bawaslu, tidak ada satupun yang berasal dari laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain minimnya pengawasan oleh masyarakat, Tokoh Adat juga belum terlihat signifikan partisipasinya dalam pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah, padahal Tokoh Adat adalah elemen penting dari masyarakat yang memiliki pengaruh dan pendukung yang kuat di masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya.

Hal ini yang perlu diteliti lebih jauh, bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah dan persiapan pemilu 2024 mendatang dan mengapa masyarakat, khususnya Tokoh Adat kurang terlihat berpartisipasi dalam hal melakukan pengawasan dan melaporkan pelanggaran pemilihan dan pemilu.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan (Peraturan Daerah. (2018). Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya., n.d.) kewajiban Damang Kepala Adat Dayak yang diatur pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2018 khususnya angka (2) yang menyatakan bahwa "Ikut memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas

kepada aparat Pemerintah terutama Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis", maka dapat kita simpulkan bahwa Tokoh Adat Dayak juga berkewajiban menciptakan pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang bertujuan menghasilkan pemimpin atau kepala daerah yang amanah dan mampu melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas dan membina masyarakat yang adil dan demokratis.

Dari beberapa penelitian terdahulu ada yang menggali peran Tokoh Masyarakat termasuk di dalamnya Tokoh Adat di masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian tersebut berjudul "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat RT 57 Bangun Reksa Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Balikpapan" oleh Ezra Mulya Kharisma Lawing Paran. Penelitian ini berhasil mengungkap peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Ditemukan keadaan bahwa meskipun untuk wilayah kota Balikpapan tingkat partisipasi politik warganya menurun, tetapi pada RT 57 partisipasi politik terhadap pilkada naik dari tahun sebelumnya dan memenuhi target partisipasi, mengingat kegiatan pilkada dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Keadaan ini tentunya tidak terlepas dari hadirnya peran tokoh masyarakat yang ada di wilayah RT 57 yang turut ikut menunjang keberhasilan kegiatan pilkada.

Penelitian berikutnya berjudul "Peran Tokoh Adat Dalam Membentuk Partisipasi Politik Masyarakat" (Studi Kasus Pilkada Sabu Rajiua, Kecamatan Hawu Mehara Tahun 2016) Alfridus S.D. dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tokoh adat berperan penting untuk mengajak, mengarahkan, mengontrol atau

mengawasi, dan pengambilan keputusan, sehingga dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon yang diinginkan dalam pemilihan dan pemilu. Menyikapi fenomena tersebut peran dari tokoh adat dirasakan sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

Penelitian berikutnya berjudul "Peran Tokoh Adat Dalam Membentuk Partisipasi Politik Masyarakat", (Studi Kasus Pilkada Sabu Raijua, Kecamatan Hawu Mehara Tahun 2016) (Dari, 2022) dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa tokoh adat berperan penting untuk mengajak, mengarahkan, mengontrol atau mengawasi, dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon yang diinginkan dalam pemilihan dan pemilu. Menyikapi fenomena tersebut peran dari tokoh adat dirasakan sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

Tujuan penelitian ini adalah memahami strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya Tokoh Adat dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dan persiapan Pemilu 2024, Pandangan Tokoh Adat terhadap strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya dalam pengawasan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dan persiapan Pemilu 2024, dan Upaya peningkatan pengawasan pemilihan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya di pemilihan kepala daerah dan Pemilu 2024 yang akan datang.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang berjudul "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Oleh Panwaslu Kota Jayapura Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 Di Kota Jayapura" (Murafer, 2018), MA dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Tahun 2018.

Penelitian ini mengungkap upaya dan strategi Panwaslu Kota Jayapura untuk meningkatkan pengawasan partisipatif, antara lain kolaborasi serta sinergitas yang kuat antara Panwaslu Kota Jayapura dan masyarakat kota Jayapura sebagai pemilih, berkomunikasi secara intensif dengan beberapa kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil. Panwaslu Kota Jayapura juga telah melibatkan Tokoh Adat dan Tokoh Agama, perguruan tinggi, media, partai politik dan lembaga negara terkait. Elemen-elemen ini dilibatkan atau didekati Panwaslu Kota Jayapura untuk turut-serta dalam proses pengawasan pemilu. Peningkatan kolaborasi antara Panwaslu Kota Jayapura dengan kelompok masyarakat sipil dan elemen-elemen inilah yang menjadi kunci peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di wilayah Kota Jayapura.

Berdasarkan uraian diatas serta didukung penelitian sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dijalankan oleh Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya Tokoh Adat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan persiapan pemilu 2024 serta upaya perbaikan strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya dalam pengawasan pemilihan kepala daerah dan pemilu 2024 mendatang.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengetahui gambaran strategi Bawaslu Kota Palangka Raya yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi Tokoh Adat Dayak dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Palangka Raya.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan (Alasan, 2021).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung aktifitas yang ada di lokasi penelitian. Selanjutnya penulis melakukan metode wawancara/interview kepada informan dengan mengacu kepada pertanyaan yang terkait dengan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 dan persiapan pemilu 2024. Kemudian untuk melengkapi data penulis melakukan studi dokumentasi berupa gambaran kondisi lokasi penelitian, biodata informan dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan aspek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak dipersoalkan berapa jumlah informan, tetapi dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Bawaslu Kota Palangka Raya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Palangka Raya.

1. **Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, antara lain Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP), Universitas PGRI Palangka Raya**

dan Institut Agama Hindu Kaharingan Negeri (IAHN) P. Raya.

Setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada informan tokoh adat di Palangka Raya, mengenai strategi bawaslu kota Palangka Raya melakukan Kerjasama dengan perguruan tinggi diperoleh data-data sebagai berikut :

Table I. Pernyataan tokoh adat terhadap strategi pertama bawaslu Kota Palangka Raya

| No | Informan | Pernyataan penting | Ket. |
|----|--|--|------|
| I | Dr. Akhmad Supriadi (Sekretaris Ormas KKB) | "...Yang pertama terkait dengan perjanjian atau MOU dengan perguruan tinggi, antara lain UPR, UMPR, terus PGRI, IAHN, mungkin IAIN, ini saya kira poin yang pertama ini adalah poin yang sangat penting. Kenapa? Karena perguruan tinggi, terutama disini ada mahasiswa itu adalah jaringan pemilih sekaligus kelompok masyarakat yang punya daya kritis paling tinggi ya, karena kalo kita tahu dulu di awal-awal reformasi juga, kan yang banyak terlibat dalam pengawasan itu juga kan mahasiswa..." "...Yang kedua, menurut saya tidak kalah penting adalah organisasi kemahasiswaan yang ekstra, karena ini juga sangat penting ya, seperti di PMII, HMI, IMM, ya, karena organisasi yang seperti ini, soliditas..." | |

Berdasarkan informasi dalam tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, terkait strategi yang pertama, yaitu strategi kerjasama Bawaslu Kota Palangkaraya dengan perguruan tinggi seperti Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP), Universitas PGRI Palangka Raya dan Institut Agama Hindu Kaharingan Negeri (IAHN) P. Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 tersebut, umumnya disambut baik dan dianggap penting oleh para Tokoh Adat namun perlu ditingkatkan dengan keterlibatan tokoh adat dalam pemilu, baik itu legislatif maupun pemilihan kepala

daerah. Selain itu kerjasama jangan berhenti kepada elit perguruan tinggi, tapi juga kepada ormas kemahasiswaan di intra dan ekstra.

2. **Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan perjanjian kerjasama dengan dengan ormas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dan Forhati serta Melakukan Kegiatan Sosialisasi terhadap Kaum Disabilitas.**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada informan tokoh adat di Palangka Raya, mengenai strategi bawaslu melakukan Kerjasama dengan ormas Forum Kerukunan Umat beragama, ormas perempuan serta sosialisasi terhadap kaum Disabilitas maka diperoleh data-data sebagai berikut :

Table II. pernyataan tokoh adat terhadap Strategi kedua bawaslu kota Palangka Raya

| No | Informan | Pernyataan penting | Ket. |
|----|---|---|------|
| I | Dr. Akhmad Supriadi (Sekretaris Ormas KKB) | "...saya kira ini juga penting, karena apa namanya, pengawasan, karena Pilkada ini kan sebenarnya tidak hanya terkait dengan pemilihan, momen pemilihannya iya, tapi ada,hal-hal berkaitan, misalnya politik identitas yang tidak bisa kita nafikan ya, politik identitas itu bisa menyebabkan kadang-kadang konflik ya, bukan hanya horizontal, tapi antar masyarakat juga konfliknya luarbiasa ya, di dunia nyata, di dunia maya, maka penting FKUB, ini juga menjadi perhatian..." | |

Berdasarkan informasi dalam tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Berdasarkan informasi dalam tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait strategi yang kedua, yaitu strategi kerjasama Bawaslu Kota Palangkaraya dengan ormas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) dan Forhati serta melakukan kegiatan sosialisasi terhadap kaum disabilitas, umumnya disambut baik dan dianggap penting oleh para Tokoh Adat, tetapi perlu ditambah intensitasnya dengan

melibatkan Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan peran aktif masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan aman, adil, dan demokratis. Partisipasi masyarakat ini termasuk ormas, Dewan Adat Dayak, dapat dilibatkan melakukan sosialisasi, dan upaya-upaya preventif dengan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu. Selain lembaga di atas, perlu dilibatkan juga lembaga Forum Pembauran Kebangsaan yang merupakan forum yang dibuat oleh pemerintah daerah dibawah Kantor Dinas Kesbanglinmaspol, dimana banyak tergabung paguyuban-paguyuban, misalnya perkumpulan orang banjar, pakuwojo, dan lain sebagainya. Selain sosialisasi dan himbuan perlu juga diadakan pelatihan simulasi, bagaimana pengawasan dilakukan dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu yang baik.

3. **Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah melalui Spanduk dan Brosur saat berkoordinasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan**

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada informan tokoh adat Palangka Raya, mengenai strategi bawaslu melakukan sosialisasi Pengawasan pemilihan Kepala Daerah dan persiapan Pemilu melalui spanduk dan brosur saat berkoordinasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan maka diperoleh data-data sebagai berikut :

Table III. pernyataan tokoh adat terhadap Strategi ketiga bawaslu Kota Palangka Raya

| No | Informan | Pernyataan penting | Ket. |
|----|---|---|------|
| I | Dr. Akhmad Supriadi (Sekretaris Ormas KKB) | "...Kemudian, sosialisasi pengawasan Pilkada melalui spanduk, brosur, ya ini juga penting ya, walaupun mungkin yang kedepan saran saya, spanduk, brosur itu, harus pada tempat-tempat yang sangat strategis..." | |

Berdasarkan informasi dalam tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait strategi yang ketiga, yaitu strategi Bawaslu Kota Palangkaraya yaitu melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala

Daerah melalui Spanduk dan Brosur saat berkoordinasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan, sebagian Tokoh Adat menyambut baik dan dianggap penting, tetapi pemasangan spanduk dan penyebaran brosur dianggap kurang banyak dan memasangnya harus di tempat-tempat strategis di wilayah berpenduduk padat, daerah basis rawan kecurangan, misalnya dipasar atau di daerah yang tps nya sedikit dan jauh. Selain di Kelurahan, dapat dipasang dirumah tokoh, misalnya di rumah tokoh adat, rumah mantir, atau di RT, RW. Tetapi, sebagian Tokoh Adat yang lain menganggap hal ini kurang efektif, karena tidak bisa menggantikan peran manusia yang bisa berbicara secara personal dan juga spanduk/brosur kurang dibaca atau tidak diperhatikan oleh masyarakat.

4. Bawaslu Kota Palangka Raya melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah melalui Media Sosial (Web, Facebook, Instagram, Youtube dan Podcast)

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada informan tokoh adat Palangka Raya, mengenai strategi bawaslu melakukan sosialisasi Pengawasan-pengawasan Pemilihan Kepala Daerah melalui media sosial (Website, Facebook, Instagram, Youtube, dan Podcast) maka diperoleh data-data sebagai berikut :

Table IV. pernyataan tokoh adat terhadap Strategi ketiga bawaslu Kota Palangka Raya

| No | Informan | Pernyataan penting | Ket. |
|----|---|---|------|
| I | Dr. Akhmad Supriadi (Sekretaris Ormas KKB) | "...Yang paling penting itu, poin yang nomor E ini ya, melalui Web, Facebook, karena generasi milenial itu yang paling diperhatikan, orang sekarang kan, kehidupan manusia itu sekarang berada di dalam genggaman, sehingga poin yang E ini, fungsi pengawasan Pilkada ini yang paling penting...." | |

Berdasarkan informasi dalam tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait strategi yang keempat, yaitu strategi Bawaslu Kota Palangkaraya

yaitu melakukan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah melalui Media Sosial (Web, Facebook, Instagram, Youtube dan Podcast), sebagian besar Tokoh Adat menyambut baik dan dianggap penting untuk kalangan muda yang milenial, tetapi kendalanya tidak semua orang memiliki HP Android atau familiar menggunakannya terutama kaum tua. Selain itu penggunaan media sosial harus berhati-hati, karena rentan dengan penyebaran informasi hoax.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut : (I) Strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan persiapan pemilu 2024 adalah perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi, FKUB, ormas-ormas perempuan, dan sosialisasi kepada kaum disabilitas serta sosialisasi pengawasan melalui media (spanduk, brosur, media sosial, youtube, facebook, instagram, podcast). (II) Para Tokoh Adat pada umumnya menyambut baik strategi yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya, akan tetapi merasa kurang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya. (III) Dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 para Tokoh Adat menyarankan adanya perbaikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat oleh Bawaslu Kota Palangka Raya melalui pelibatan secara aktif para Tokoh Adat dalam setiap kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kota Palangka Raya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti secara khusus mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima petunjuk, bimbingan, arahan bahkan dorongan semangat dari berbagai pihak baik yang bersifat moral dan material.

REFERENSI

- Alaslan, A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (1st ed.). Rajawali Pers. https://www.researchgate.net/publication/360795146_Metode_Penelitian_Kualitatif/link/6294024988c32b037b5cf1f1/download.
- Dari, A. S. D. (2022). Peran Tokoh Adat Dalam Membentuk Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Politiconesia*, 1(2), 93–98. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jp/article/view/p825>
- David, A. B., Sekretariat, D., Kabupaten, K., Sulawesi, B., & Indonesia, T. (n.d.). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Academia.Edu*, 2(1), 52–60.
- Herlinda, H. (2021). Partisipasi publik dalam pemilihan gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020 (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Murafer, Y. R. (2018). Peningkatan Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 di Kota Jayapura. *Jurnal Politik & Pemerintahan*, 2(2).
- Nasihah, D. (2021). Kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Peraturan Daerah. (2018). Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya. (n.d.). https://jdihn.go.id/files/819/Peraturan_Daerah_Nomor_6_Tahun_2018.pdf
- Riwanto, A., Achmad, A., Suranto, S., Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 279-289.
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In CV. Alfabeta (Ke26 ed.). CV. Alfabeta.
- Yukrisna, T., Satia, M. R., & Bernadianto, R. B. (2020). Pemilihan Umum Serentak Presiden/Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Kapuas: Participatory supervision of communities in concurrent elections of the President/Vice president and Legislative elections of the year 2019 in Kapuas Regency. *Pencerah Publik*, 7(1), 1-10.